

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI DALAM NEGERI,
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI
INDONESIA TAHUN 2013 – 2022**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Fauzan Faturrokhim
Nomor Mahasiswa : 20313016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2024

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan
Manusia Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di
Indonesia Tahun 2013 – 2022

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Fauzan Faturrokhim
Nomor Mahasiswa : 20313016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2024

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti maksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya akan sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Yogyakarta, 29 Mei 2024

Penulis



Fauzan Faturrokhim

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan
Manusia Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di
Indonesia Tahun 2013 – 2022

Nama : Fauzan Faturrokhim
Nomor Mahasiswa : 20313016
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 24 Mei 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Q' shape followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

Dosen Pembimbing,

Prof. Jaka Sriyana, SE., Msi., PhD

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2013 – 2022

Disusun oleh : FAUZAN FATURROKHIM

Nomor Mahasiswa : 20313016

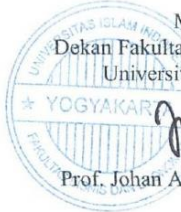
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 03 Juli 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah menghidayahkan segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar tanpa adanya halangan apapun. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga terkasih. Terima kasih kepada Ayah penulis Ahmad Asrofi, Ibu penulis Ai' Juariyah, Nenek Penulis Mu'ipah dan seluruh adik-adik penulis yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang dengan sabar dan penuh ketelitian dalam mewariskan ilmunya kepada kami, baik dari segi akademis maupun ilmu kehidupan. Tak lupa terima kasih juga diucapkan kepada Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar dalam mendampingi proses pengerjaan skripsi ini.

Kemudian, terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh teman yang selalu memberikan sebuah tempat kembali untuk penulis dan menghadiahkan hal yang sangat berharga bagi penulis yaitu sebuah kenangan indah. Kebajikan kalian akan selalu terpatrit di hati penulis.

Semoga seluruh kebaikan yang telah kita berikan akan menjadi hal yang paling indah bagi orang lain dan semoga kebaikan tersebut terus berlanjut hingga kembali kepada diri kita sendiri.

MOTTO

“Lakukanlah semaumu, apapun konsekuensinya, biar aku di masa depan yang akan bertanggung jawab”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbi 'Alaamiin asholaatu wassalaamu 'alaa Asyrafil-Ambiyai wal-Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa 'ala aalibi wa shobbihi ajma'ün. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafa'at dan manfaat sehingga kita dapat merasakan zaman yang penuh kemajuan dan penuh kebahagiaan seperti saat ini. Berkat izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2013 – 2022”**.

Skripsi ini disusun sebagai prasyarat yang wajib dipenuhi untuk dapat memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan oleh seluruh pihak yang terkait, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban tugas akhir tanpa adanya halangan apapun. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan kata terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yth. Bapak Johan Arifin, M.Si., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Abdul Hakim S.E., M.Ec. Selaku Kepala Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., Msi., PhD. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan solusi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia mulai dari Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Prodi beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang bermanfaat selama perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, Ahmad Asrofi dan Ai' Juariyah, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, nasihat dan kepercayaannya atas semua pilihan hidup penulis.
6. Nenek penulis, Mu'ipah, yang selalu memberikan kasih sayang dan menyuguhkan makanan enak setiap harinya. Penulis sangat bersyukur atas semua itu.
7. Sahabat-sahabat Imadu Yogyakarta sebagai rumah kedua bagi penulis untuk bersandar dan bersenda gurau selama berada di perantauan serta ucapan terima kasih atas bantuan saran dan diskusi dalam mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan KKN Desa Tambakboyo Unit 512, yang telah memberikan sebuah arti baru dari kekeluargaan dan kebahagiaan.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap masukan dan kritik yang diberikan oleh pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai khalayak, terutama mahasiswa, dosen dan pemerintah dalam memahami fenomena yang terjadi pada ketimpangan di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr.WB

Yogyakarta, 24 Mei 2024

Fauzan Faturrokhim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8

2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Ketimpangan Pendapatan	11
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi	13
2.2.3 Investasi Dalam Negeri.....	14
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	15
2.2.5 Belanja Modal	17
2.3 Hubungan Antara Variabel Dependen dan Independen	18
2.3.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan	18
2.3.2 Hubungan Investasi Dalam Negeri dengan Ketimpangan Pendapatan	19
2.3.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Pendapatan.....	20
2.3.4 Hubungan Belanja Modal dengan Ketimpangan Pendapatan.....	20
2.4 Kerangka Pemikiran.....	21
2.5 Hipotesis Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.2 Definisi Variabel Operasional.....	22
3.2.1 Variabel Dependen	23
3.2.2 Variabel Independen.....	23
3.3 Metode Analisis	24
3.4 Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	25
3.4.1 Uji Chow	25

3.4.2 Uji Hausman	26
3.4.3 Uji Langrange Multiplier (LM).....	26
3.5 Uji Hipotesis	27
3.5.1 Uji Simultan F	27
3.5.2 Uji Parsial T	27
3.6 Koefisien Determinasi (R^2).....	28
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Deskripsi Data Penelitian	29
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	29
4.2.1 Pengujian <i>Common Effect Model</i> (CEM), <i>Fixed Effect Model</i> (FEM), Dan <i>Random Effect Model</i> (REM)	29
4.2.2 Pemilihan Model Terbaik	30
4.3 Model Terbaik (<i>Fixed Effect Model</i>).....	32
4.4 Uji Hipotesis	33
4.4.1 Uji Simultan (Uji F).....	33
4.4.2 Uji Parsial (Uji T).....	34
4.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	35
4.6 Pembahasan	36
4.6.1 Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	36
4.6.2 Pengaruh Variabel Investasi Dalam Negeri Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	37
4.6.3 Pengaruh Variabel Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	37

4.6.4 Pengaruh Variabel Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan...	38
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	40
5.1 SIMPULAN.....	40
5.2 IMPLIKASI.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio Gini 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2002	3
Gambar 2. 1 Kurva Lorenz.....	12
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi Capaian IPM.....	17
Tabel 4. 1 Hasil Estimasi CEM, FEM dan REM	30
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow	31
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman.....	31
Tabel 4. 4 Model Terbaik Fixed Effect.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Penelitian	47
Lampiran B Common Effect.....	58
Lampiran C Fixed Effect	59
Lampiran D Random Effect.....	60
Lampiran E Uji Chow	61
Lampiran F Uji Hausman.....	62

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai provinsi dengan karakteristik perekonomian yang berbeda di setiap wilayah. Sejak awal tahun 2010, perekonomian Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di setiap provinsi. Namun, peningkatan tersebut tidaklah selalu merata di setiap provinsi yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2013 – 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis data kuantitatif yang berupa data panel dengan memuat empat variabel bebas yakni Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal. Sedangkan variabel terikatnya yaitu Ketimpangan Pendapatan. Data penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan menggunakan metode *Fixed Effect*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan negatif. Sedangkan variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam penerapan kebijakan untuk meminimalisir ketimpangan pendapatan khususnya antar provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Ketimpangan Pendapatan*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai provinsi dengan karakteristik perekonomian yang berbeda di setiap wilayah. Sejak awal tahun 2010, perekonomian Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di setiap provinsi. Namun, peningkatan tersebut tidaklah selalu merata di setiap provinsi yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Berdasarkan World Bank, terdapat empat sumber penyebab ketimpangan, yaitu; pertama adalah bahwa keluarga miskin mengalami ketimpangan peluang karena mereka sejak awal tidak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Kedua, disebabkan oleh pekerjaan yang kurang merata, karyawan yang memiliki keterampilan akan menerima kompensasi gaji yang lebih tinggi dan karyawan yang tidak memiliki keterampilan akan cenderung mendapatkan kompensasi yang rendah. Ketiga, perbedaan aset yang dimiliki. Masyarakat yang memiliki banyak aset akan cenderung mendorong ketimpangan saat ini atau masa depan. Keempat, saat terjadi goncangan perekonomian maka masyarakat miskin akan merasakan dampak lebih besar dan akhirnya kemampuan untuk mendapatkan pendapatan akan menurun (Adams & Richard, 2003).

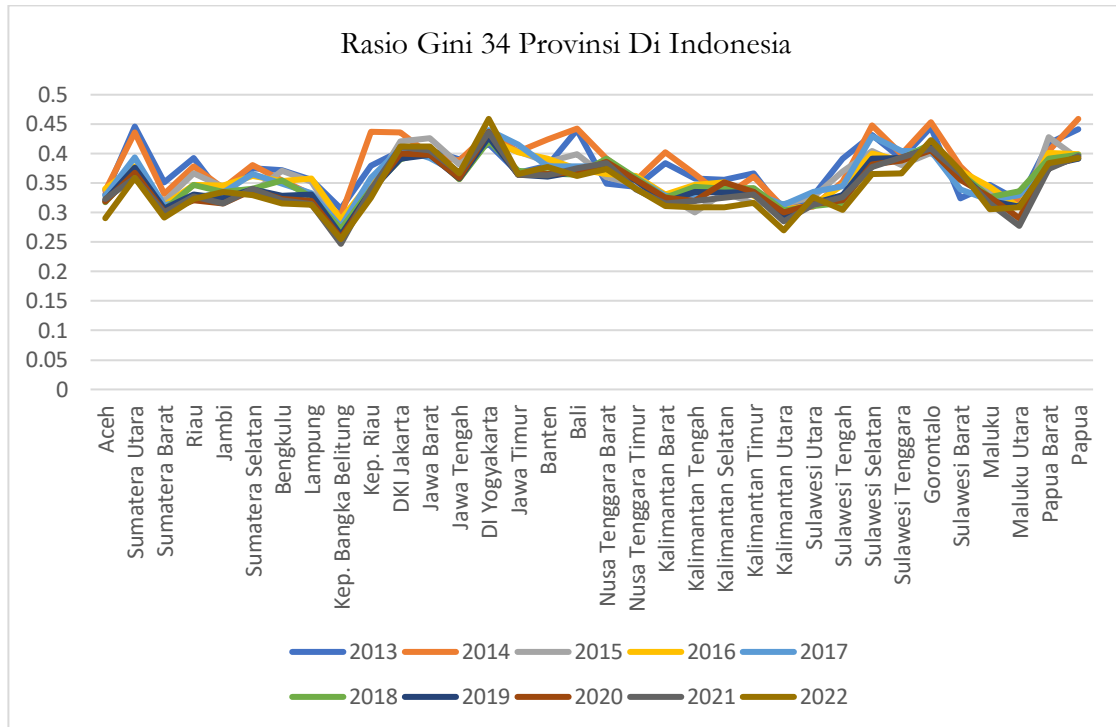
Kemajuan perekonomian suatu daerah menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak mengalami ketimpangan. Ketika perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan, maka dapat dipastikan pendapatan per kapita pada daerah tersebut telah mengalami peningkatan (Rahayu, 2021). Peningkatan pendapatan per kapita memang mencerminkan kemajuan ekonomi suatu daerah. Namun, kenaikan pendapatan per kapita tidak selalu berarti bahwa distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Seringkali, negara-negara berkembang lebih mengutamakan penggunaan modal dibandingkan tenaga kerja, sehingga hanya sebagian masyarakat yang menikmati keuntungan ekonomi tersebut. Jika pendapatan nasional

tidak didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan telah terjadi.

Masalah yang sering dialami oleh negara maju dan negara berkembang sering kali berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat ketimpangan, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk (Damanik et al, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi ketika dalam perekonomian terdapat perbedaan atau kesenjangan pada beberapa hal, seperti distribusi pendapatan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.

Ketimpangan pendapatan adalah isu penting dalam pembangunan setiap negara karena berkaitan dengan bagaimana pendapatan didistribusikan di masyarakat. Jika ketimpangan distribusi pendapatan meningkat, maka pendapatan menjadi semakin tidak merata (Maorencia & Marwan, 2023). Ketimpangan ini disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak merata, yang menghasilkan perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Ketimpangan pendapatan ini tidak dapat dihilangkan ataupun dimusnahkan. Namun, ketimpangan ini dapat dikurangi hingga tingkat yang dapat diterima di sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu negara kurang mampu, negara berkembang hingga maju hanya bisa membedakan seberapa besar tingkat ketimpangan di masing-masing negara.

Ketimpangan pendapatan Indonesia dapat dilihat melalui *index gini ratio* yang merupakan salah satu ukuran ketimpangan dengan mengukur nilai koefisien gini. Menurut BPS, indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah rasio gini yang berkisar antara nol sampai satu. Ketika koefisien gini bernilai nol maka mengindikasikan tidak terdapat ketimpangan (pemerataan sempurna), namun jika koefisien gini bernilai satu maka mengindikasikan adanya ketimpangan (ketimpangan sempurna). Berikut, rasio gini 34 Provinsi di Indonesia.



Gambar 1. 1 Rasio Gini 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat dalam 10 tahun terakhir rasio gini antar provinsi di Indonesia sangat berfluktuatif. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam setiap tahunnya mengalami penurunan ketimpangan yang cukup signifikan. Terlihat pada tahun 2021 indeks rasio gini berada di angka 0.247 persen kemudian terjadi kenaikan yang cukup rendah di tahun 2022 menjadi 0.255 persen. Akan tetapi, pada tahun 2020 indeks rasio gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di angka 0.257 persen. Artinya, walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2022 namun di tahun 2021 telah terjadi penurunan ketimpangan yang sangat signifikan. Rendahnya rasio gini pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, seperti; infrastruktur pendidikan yang sudah memadai, tingkat kemiskinan yang rendah, angka populasi manusia yang relatif kecil dan sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal (BPS Kep. Bangka Belitung, 2022). Kemudian, tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi berada pada angka 0.459 persen yang terletak di

Provinsi D.I Yogyakarta. Menurut Farhan & Sugianto (2022), hal ini disebabkan oleh beberapa aspek, seperti; tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah dan rendahnya mobilitas sosial.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan nasional dan wilayah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah disamping pembangunan fisik dan sosial. Melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan mampu mengurangi masalah pembangunan seperti ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, ketika pertumbuhan ekonomi suatu provinsi sudah cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan pemerataan di provinsi lainnya, maka juga akan menimbulkan masalah ketimpangan. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan antar provinsi dalam akses infrastruktur, sumber daya, dan peluang investasi yang menjadi penyebab ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Menurut hipotesis Kuznets, Pertumbuhan ekonomi pada tahap awal akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, kemudian pada tahap selanjutnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan (Santosa, 2015). Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, sehingga memerlukan mobilitas tenaga kerja, modal dan teknologi untuk menopang pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah investasi. Investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal, seperti mesin, peralatan, bangunan, dan tanah. Investasi dapat meningkatkan produktivitas, kapasitas produksi, dan pendapatan nasional suatu negara dengan menciptakan lapangan kerja dengan harapan dapat meratakan pembangunan antar daerah. Adakalanya, investasi dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan, jika terjadi peningkatan atau penurunan pada investasi sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami hal yang serupa

(Istiqamah et al, 2018). Masalah ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah maka akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, semakin banyak investasi yang masuk ke suatu wilayah justru akan menimbulkan ketimpangan atau ketidakmerataan sebab investasi hanya terkonsentrasi pada satu titik wilayah saja dan akhirnya terjadi kesenjangan antar wilayah yang berdampak pada meluasnya ketimpangan. Sehingga, terdapat hal yang mendorong tingginya investasi dalam suatu wilayah yaitu perbedaan kondisi demografi. Perbedaan kondisi demografi ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan yang terjadi antar daerah, sebab kondisi demografi yang baik akan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja masyarakat. Kemudian akan merangsang pertumbuhan ekonomi, melalui meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja yang semakin tinggi akan mendorong peningkatan investasi.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi dan investasi, ketimpangan pendapatan juga dapat dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah atau daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Pada dasarnya, IPM memiliki peran penting dalam meningkatnya sumber daya manusia (SDM) melalui indikator pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak. Ketika sumber daya manusia di suatu daerah membaik, maka akan memberikan efek pada pendapatan yang meningkat. Namun, Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi di suatu daerah juga dapat menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan. Dengan masyarakat yang semakin berkualitas, memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi maka akan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga akan mempertinggi ketimpangan pendapatan (Raziq & El Hasanah, 2023).

Selanjutnya, peran signifikan anggaran keuangan pemerintah menjadi peran penting dalam konteks ketimpangan pendapatan. Peran ini akan semakin terealisasi dengan bergantung pada rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya (Mansyur et al, 2021). Secara umum, belanja modal pemerintah didistribusikan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan belanja modal pemerintah memerlukan tenaga kerja, yang selanjutnya akan meningkatkan penyerapan terhadap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan lebih banyak orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Hal ini dapat tercapai melalui kebijakan pengeluaran daerah yang tepat sasaran, dengan memberikan prioritas pada daerah yang mengalami ketimpangan. Namun, ketika pengeluaran pemerintah menurun, maka cenderung meningkatkan disparitas antar daerah dan mempersempit ruang, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dalam negeri, indeks pembangunan manusia dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2022 dengan menggunakan *index gini ratio* dan *Lorenz curve* sebagai preferensi untuk mendukung tingkat keberhasilan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan?
2. Bagaimana pengaruh Investasi Dalam Negeri terhadap Ketimpangan Pendapatan?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan?

4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan.
2. Menganalisis pengaruh Investasi Dalam Negeri terhadap Ketimpangan Pendapatan.
3. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan.
4. Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, akademisi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan akademis ilmu ekonomi pembangunan khususnya perihal korelasi antara pertumbuhan ekonomi, investasi, indeks pembangunan manusia, belanja modal dan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, bagi peneliti dan masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi wawasan baru.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan untuk dapat mempertimbangkan kembali langkah yang akan diambil dalam penerapan kebijakan untuk meminimalisir ketimpangan pendapatan dengan memperhatikan beberapa komponen pertumbuhan ekonomi, investasi, indeks pembangunan manusia, belanja modal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dalam negeri, indeks pembangunan manusia dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini bertujuan untuk menggunakan penelitian atau riset terdahulu sebagai referensi dalam mendukung penelitian agar dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu:

Penelitian terdahulu oleh Febriyani & Anis (2021) terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang positif dan negatif dengan kesimpulan tidak selamanya pertumbuhan ekonomi memberikan dampak baik pada pemerataan pendapatan masyarakat. Sedangkan peningkatan investasi di suatu daerah tanpa melibatkan daerah lainnya dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, begitu pula dengan indeks pembangunan manusia yang memiliki hubungan positif pada ketimpangan pendapatan, dimana peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Metode dalam penelitian ini berupa analisis regresi panel yang menggunakan random effect model dengan variabel X = pertumbuhan ekonomi, investasi, indeks pembangunan manusia dan variabel Y = ketimpangan distribusi pendapatan.

Maesza et al. (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Anggaran Pertahanan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2000-2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa, anggaran pertahanan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan investasi juga berpengaruh

positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Metode dalam penelitian ini berupa data *time series* yang menggunakan uji asumsi klasik dengan variabel X = anggaran pertahanan, pertumbuhan ekonomi, investasi dan variabel Y = ketimpangan pendapatan.

Anshari et al. (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi Indonesia. Data penelitian menggunakan data sekunder dengan metode regresi data panel dengan variabel X = pendidikan, upah minimum provinsi, belanja modal dan variabel Y = ketimpangan pendapatan.

Ishak et al. (2018) melakukan riset tentang the effect of capital expenditure and investment on income inequality. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta belanja modal dan investasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Metode yang digunakan berupa analisis regresi berganda dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika Indonesia dengan variabel X = belanja modal, investasi dan Y = ketimpangan pendapatan.

Istiqamah et al. (2018) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga, hasil dari analisis menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin di provinsi-provinsi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data deret waktu (*time series*)

selama periode Tahun 2010 –2016 dan data deret lintang (*cross section*) yaitu 34 provinsi di Indonesia dengan variabel X = pertumbuhan ekonomi dan variabel Y = ketimpangan pendapatan, kemiskinan.

Amali & Syafri (2023) melakukan riset tentang ketimpangan pendapatan pada 33 provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Data yang digunakan berupa data panel dengan metode analisis Fixed Effect Model dimana data diambil secara tahunan dari 33 Provinsi dengan variabel X = indeks pembangunan manusia, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan variabel Y = ketimpangan pendapatan.

Maorencia & Marwan (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia”. Dalam penelitian ini uji F menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan indeks pembangunan manusia secara signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Sementara itu, hasil uji t menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan asosiatif, menggunakan data panel yang diambil dalam rentang waktu 2018 hingga 2022. Variabel yang diteliti meliputi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen (X), serta ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen (Y).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan (*income inequality*) merupakan perbedaan atau kesenjangan proses pembangunan antar daerah yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam aspek perekonomian. Menurut Kuznets (2019) ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang lebih besar dibandingkan di negara-negara maju, sebab adanya perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dimana awalnya ketimpangan pendapatan meningkat dan selanjutnya menurun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan di negara berkembang serta mobilitas ekonomi yang cukup signifikan. Ketimpangan awalnya disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi di masing-masing wilayah (Mahardiki & Santoso, 2013). Akibatnya, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi bervariasi. Di samping itu, ketimpangan juga semakin meluas melalui mobilitas barang dan jasa yang tidak merata dan ketidakmerataan alokasi dana antar wilayah.

Menurut Kuncoro (2006) kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu; Pertama, melalui tingkat kemodernan, kesenjangan dapat diidentifikasi dari seberapa modern atau tradisional suatu daerah. Daerah perkotaan yang maju dengan teknologi menunjukkan sektor modern, sedangkan daerah pedesaan yang kurang berkembang mencerminkan sektor tradisional. Kedua, kesenjangan regional adalah kesenjangan yang terjadi antara daerah dengan potensi ekonomi tinggi dan daerah dengan potensi ekonomi rendah. Ketiga, kesenjangan menurut etnis yaitu kesenjangan menurut perbedaan etnis atau budaya antara masyarakat pribumi dan non-pribumi.

Ketimpangan pendapatan dapat diukur melalui rasio indeks gini, dimana indeks gini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa timpang atau meratanya pendapatan suatu daerah. Rasio gini dijelaskan melalui angka koefisien 0 hingga 1. Ketika rasio gini semakin kecil dan mendekati 0, maka distribusi pendapatan

menunjukkan pemerataan sempurna. Sedangkan, jika rasio gini semakin besar dan mendekati 1 mengindikasikan terjadinya ketimpangan (ketimpangan sempurna). Dalam menghitung rasio gini, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan:

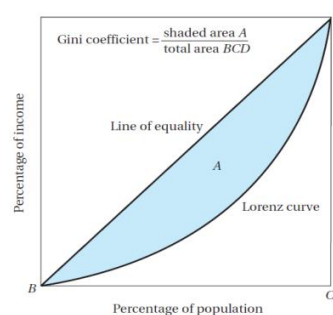
GR = Rasio gini

f_i = Jumlah penerima pendapatan kelas i

Y_i = Jumlah kumulatif pendapatan kelas ke- i

Y_{i-1} = Jumlah kumulatif pendapatan kelas ke $i-1$

Rasio gini digambarkan melalui Kurva Lorenz yang menjelaskan hubungan antara persentase penduduk dan persentase pendapatan (Kuncoro, 2006). Nilai gini rasio ditentukan dengan cara menghitung luas daerah garis pemerataan dan dibandingkan dengan luas segitiga pada bujur sangkar yang memuat kurva lorenz (Rahma, 2018).



Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

Sumber: Todaro & Smith, 2012

Pada kurva lorenz sumbu horizontal merupakan persentase kumulatif penduduk, sementara sumbu vertikal merupakan persentase kumulatif dari total pendapatan. Keseimbangan distribusi pendapatan dapat terjadi ketika berada di titik 45 derajat pada kurva lorenz, namun semakin jauh garis lorenz dari *line of quality* maka akan semakin

lebar juga ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro & Smith, 2012). Jika kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin menjauh dari garis diagonal atau semakin melengkung, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produksi barang dan jasa pada suatu periode waktu yang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada (Todaro, 2007). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output agregat, yaitu keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai total akhir dari seluruh output yang diproduksi dalam suatu perekonomian negara. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merujuk pada nilai output suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, ukuran yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk tingkat nasional dan persentase perubahan PDRB untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisisnya berdasarkan pada keyakinan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ekonomi klasik dikembangkan oleh para ahli ekonomi yang hidup pada periode abad ke-18 hingga awal abad ke-20, seperti Adam Smith, David Ricardo, dan W.A. Lewis. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan (Syahputra, 2017).

Teori pertumbuhan ekonomi modern dikenal dengan tidak adanya mekanisme pasar bebas (Priyono & Ismail, 2012). Teori Harrod-Domar dan Sollow-Swan juga

dikenal dengan teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa setiap peningkatan dalam kapasitas modal masyarakat akan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan produksi. Produksi yang dimaksud adalah hasil potensial yang dapat dicapai dengan modal yang dimiliki. Meskipun demikian, produksi yang benar-benar terwujud tidak selalu sama dengan hasil potensial, karena hal tersebut bergantung pada jumlah permintaan agregat. Dan teori Solow-Swan lebih merujuk pada pengembangan teori Harrod-Domar, yaitu pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan faktor produksi; penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal.

Dalam bukunya, Todaro (1994) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, yaitu:

1. Akumulasi modal. Menimbun pendapatan saat ini untuk meningkatkan output di masa mendatang. Akumulasi modal diperoleh dari sebagian pendapatan masyarakat, kemudian ditabung dan di investasikan.
2. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja. Dengan tingginya pertumbuhan penduduk maka jumlah angkatan kerja akan semakin meningkat dan produksi tenaga kerja juga akan meningkat. Namun hal ini bergantung pada kemampuan suatu negara dalam menyerap tenaga kerja.
3. Kemajuan teknologi. Dengan majunya teknologi suatu negara maka akan menjadi faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Investasi Dalam Negeri

Investasi atau penanaman modal merupakan suatu bentuk pembelian barang modal produksi, dengan tujuan menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Menurut ahli, investasi adalah "*engine of growth*" (Sutawijaya, 2010) yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan umumnya didukung oleh adanya investasi. Investasi yang meningkat dari tahun ke tahun akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang semakin besar.

Menurut Mankiw (2006) investasi adalah komponen GDP (*gross domestic product*) yang mengaitkan pembelian barang-barang di masa kini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pada masa mendatang. Investasi berdasarkan pembentukan modal dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi netto dan bruto. Investasi netto adalah pembelian barang modal baru sedangkan investasi bruto adalah investasi netto ditambah dengan pengeluaran barang modal lama. Investasi bersumber dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 2, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Dalam Undang-Undang yang sama, dijelaskan juga beberapa pihak yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), Badan Usaha Indonesia dan Pemerintah Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa pihak yang dapat melakukan pengajuan PMDN, sebagai berikut (Hartini, 2009):

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Perseroan Terbatas (PT)
4. CV (*Comanditair Venootschap*)
5. Fa (Firma)
6. Perorangan (PO)

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator yang digunakan dalam suatu perekonomian untuk mengukur kualitas hidup manusia di suatu negara, dengan kombinasi dari bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan per kapita. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), terdapat tiga faktor yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam indeks pembangunan manusia, yaitu:

1. Angka harapan hidup, diukur melalui kualitas kesehatan dan panjangnya umur penduduk. Jadi, semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin baik kondisi kesehatan dan umur penduduk.
2. Pengetahuan dan tingkat pendidikan, diukur melalui rata-rata lamanya sekolah dalam jenjang pendidikan formal (dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas) dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas.
3. Standar hidup layak, diukur melalui rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP). Menurut (Todaro, 2011) Standar hidup manusia diukur berdasarkan pendapatan per kapita riil, yang disesuaikan dengan paritas daya beli setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup di masing-masing negara. Dari ukuran ini, standar kehidupan suatu negara dapat ditentukan. Negara dengan standar hidup tinggi umumnya memiliki pendapatan yang tinggi, ketimpangan pendapatan yang rendah, sistem pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang baik. Sebaliknya, negara dengan standar hidup rendah biasanya menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi, kualitas pendidikan yang rendah, dan layanan kesehatan yang kurang memadai.

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas penduduk. Ketika IPM rendah maka produktivitas penduduk cenderung menurun yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan mereka menjadi rendah. Sebaliknya, semakin tinggi IPM maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas penduduk sehingga mendorong peningkatan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia melalui tiga komponen utama, yaitu; penghasilan perkapita, pendidikan dan kesehatan (Sudarlan, 2015). Dengan demikian, untuk membangun kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dapat diukur melalui capaian IPM yang terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

Tabel 2. 1
Klasifikasi Capaian IPM

Klasifikasi	Capaian
Sangat tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2.2.5 Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan secara umum sebagai pengeluaran dengan tujuan pembentukan modal seperti; pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud atau barang inventaris yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode (lebih dari satu tahun). Belanja modal melibatkan akuisisi tanah, peralatan mesin, pembangunan gedung, infrastruktur seperti jalan dan irigasi, serta pembelian aset tetap lainnya. Hal ini merupakan komponen dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendukung operasional dan pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Halim & Kusufi (2007) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang memiliki manfaat dalam jangka 1 tahun anggaran atau lebih. Selain itu, belanja modal akan menambah aset atau kekayaan daerah dan menambah belanja yang bersifat rutin, seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai Belanja Daerah, menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi; Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi; Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tugas utama pemerintah di negara berkembang adalah mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari pengeluaran atau investasi pemerintah di berbagai sektor. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya diarahkan pada sektor publik yang mendukung pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup, seperti pendidikan dan kesehatan (Wahyudi, 2020). Investasi di kedua sektor ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan handal serta meningkatkan standar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain untuk pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup, pengeluaran pemerintah juga difokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar. Misalnya, pengeluaran untuk sektor pertanian, pembangunan industri, pengembangan perdagangan, serta koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi ini, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dasar yang memadai.

2.3 Hubungan Antara Variabel Dependen dan Independen

2.3.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengetahui seberapa timpang pendapatan suatu negara dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka perlu di perhatikan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita (Rambey, 2018). Besarnya pendapatan nasional menjadi penentu utama dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering dijadikan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Hubungan yang erat antara pendapatan per kapita dan pertumbuhan penduduk menyebabkan jika peningkatan pendapatan nasional lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk, maka

tingkat pendapatan per kapita akan meningkat, dan sebaliknya. Untuk menjaga tingkat kesejahteraan relatif atau pendapatan per kapita, perlu dicapai tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang sejajar dengan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan kurva U terbalik Kuznets, dijelaskan bahwa pada jangka pendek terdapat hubungan positif antara peningkatan pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Namun, dalam jangka panjang, hubungan tersebut berubah menjadi negatif. Dalam model Lewis, tahap pertumbuhan awal lebih terfokus pada sektor industri modern dengan lapangan kerja yang terbatas, tetapi upah dan produktivitasnya tinggi. Kurva Kuznets dihasilkan melalui proses pertumbuhan berkelanjutan yang berasal dari perluasan sektor modern. Meskipun demikian, Kuznets tidak memberikan penjelasan mekanis tentang bagaimana kurva U terbalik ini terbentuk secara rinci, meskipun secara prinsip hipotesis nya konsisten dengan tahapan pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2012).

2.3.2 Hubungan Investasi Dalam Negeri dengan Ketimpangan Pendapatan

PMDN menjadi parameter signifikan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di seluruh wilayah (Irawan, 2023). Kehadiran PMDN diharapkan dapat merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, permasalahan muncul ketika investasi cenderung terpusat pada beberapa daerah tertentu. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan investor untuk mencari keuntungan maksimal, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang meningkat di antara masyarakat dan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk meraih pendapatan yang tinggi, yang kemudian berdampak positif pada daerah tempat tinggalnya. Apabila setiap daerah memiliki IPM yang tinggi, yang ditandai dengan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan yang merata, maka ketimpangan pendapatan antarwilayah akan menurun.

2.3.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan

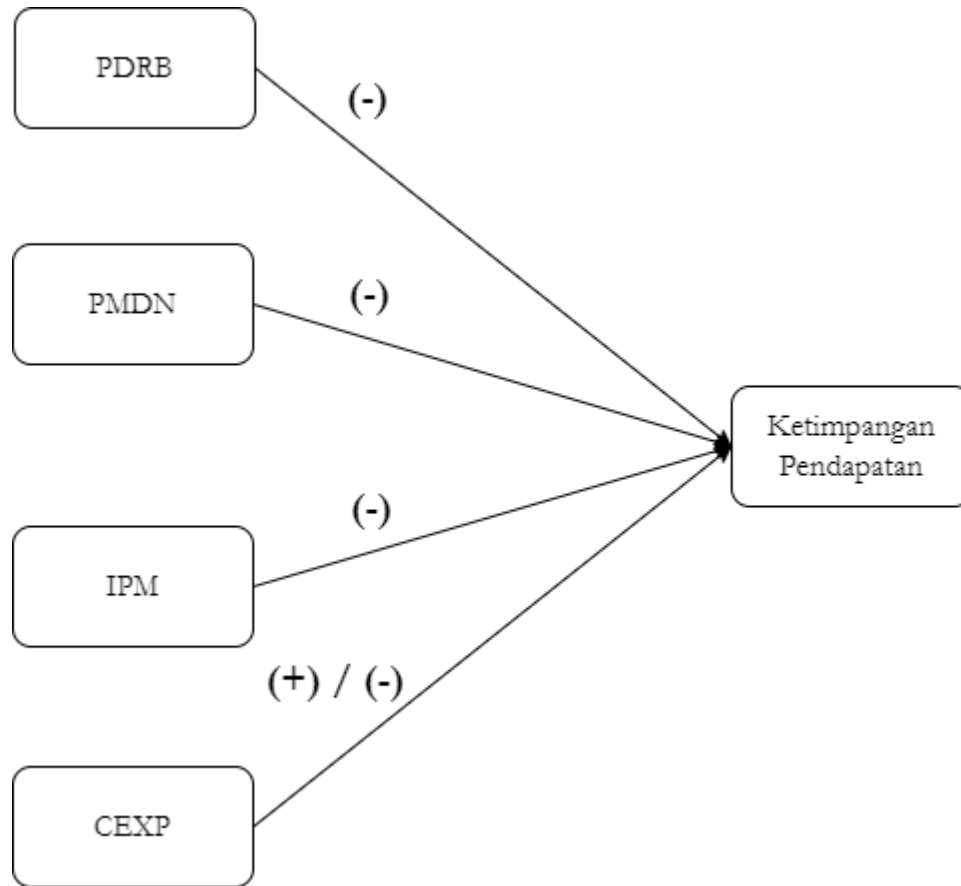
Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah dan berperan penting dalam proses pembangunan lokal. Tingkat pendidikan yang tinggi mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan (Putra & Lisna, 2020). Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi umumnya memiliki kualitas yang lebih baik daripada mereka yang berpendidikan rendah. Ini berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas kerja, sehingga individu tersebut dapat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan tinggi atau menghasilkan output yang signifikan. Akibatnya, peningkatan ini dapat mendorong kesejahteraan dan mengurangi risiko kemiskinan. Tingkat IPM yang tinggi memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada daerah tersebut. Namun, jika daerah lain tidak mengalami perbaikan yang serupa, ketimpangan pendapatan antar wilayah dapat terjadi.

2.3.4 Hubungan Belanja Modal dengan Ketimpangan Pendapatan

Belanja modal menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing. Alokasi pengeluaran belanja modal harus memperhatikan beberapa aspek, seperti kemanfaatan dalam jangka waktu yang lama yaitu melebihi satu tahun anggaran dan penambahan aset pemerintah sehingga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan. Belanja modal juga dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang aktivitas ekonomi di daerah yang kurang berkembang dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi mobilitas modal dan tenaga kerja (Sjafrizal, 2008). Oleh karena itu belanja modal dapat mempengaruhi tinggi atau tidaknya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

1. Diduga terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan
2. Diduga terdapat hubungan negatif antara investasi dalam negeri dengan ketimpangan pendapatan
3. Diduga terdapat hubungan negatif antara indeks pembangunan manusia dengan ketimpangan pendapatan
4. Diduga terdapat hubungan positif atau negatif antara belanja modal dengan ketimpangan pendapatan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis data kuantitatif yang berupa data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia dan biasanya data ini sudah siap pakai (Widarjono, 2019). Data sekunder diperoleh dari laporan maupun publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data sekunder dalam penelitian ini berjenis data panel yaitu gabungan data *time series* dan data *cross section* dengan rentan waktu 2013-2022 dari 34 provinsi di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data PDRB menurut harga konstan 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
2. Data PMDN 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
3. Data IPM 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
4. Data Belanja Modal berdasarkan pengeluaran pemerintah 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
5. Data rasio gini semester II (September) 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3.2 Definisi Variabel Operasional

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan berupa ketimpangan pendapatan dan variabel independen menggunakan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah berupa nilai rasio gini yaitu tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini berupa rasio gini semester II (September) 34 provinsi di Indonesia tahun 2013-2022. Satuan yang digunakan persen.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi besarnya variabel dependen. Berikut ini adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel pertumbuhan ekonomi didapat dari laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010, 34 provinsi di Indonesia tahun 2013-2022 yang bersumber dari situs resmi BPS. Satuan yang digunakan yaitu miliar rupiah.

2. Investasi Dalam Negeri

Variabel investasi dalam negeri didapat dari realisasi investasi penanaman modal dalam negeri 34 provinsi di Indonesia tahun 2013-2022 yang bersumber dari situs resmi BPS. Satuan yang digunakan yaitu miliar rupiah.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Variabel indeks pembangunan manusia didapat dari indikator IPM berupa Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PNB per kapita. Data bersumber dari BPS di 34 provinsi Indonesia tahun 2013-2022.

4. Belanja Modal

Variabel belanja modal didapat dari total realisasi pengeluaran pemerintah 34 provinsi di Indonesia tahun 2013-2022 yang bersumber dari DJPK. Satuan yang digunakan miliar rupiah.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Menurut Widarjono (2018) data panel memiliki kelebihan yaitu mampu menyediakan data yang lebih banyak serta dapat menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Alat yang digunakan dalam melakukan analisis data yaitu EViews 12. Model persamaan estimasi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Gini Ratio (%)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)

PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (Miliar Rupiah)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

CEXP = Belanja Modal (Miliar Rupiah)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien masing-masing variabel independen

e = Komponen Error

i = 34 Provinsi Indonesia

t = Tahun 2013-2022

Terdapat tiga model untuk mengestimasi regresi data panel, yaitu:

1. *Common Effect Model* (CEM)

CEM merupakan model regresi yang paling sederhana, yaitu dengan menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Model ini tidak terdapat perbedaan antar waktu dan individu, sehingga data memiliki periode waktu

yang sama. Metode yang digunakan untuk meng-estimasi model ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

FEM merupakan model estimasi data panel yang menggunakan variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intersep, akan tetapi slope koefisien tetap konstan. Metode yang digunakan untuk meng-estimasi model ini adalah *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Adapun model *fixed effect* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{1i} + \beta_6 D_{2i} \dots + e_{it}$$

3. *Random Effect Model* (REM)

REM merupakan model estimasi data panel yang mengatasi masalah ketidakpastian dalam model *fixed effect* dengan memperhitungkan variasi antar individu dan efek individu yang berubah seiring waktu. Metode yang digunakan untuk meng-estimasi model ini adalah *Generalized Least Square* (GLS). Model ini memiliki keuntungan yang dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Adapun model *random effect* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + v_{it} \dots (2) v_{it} = e_{it} + u_i$$

3.4 Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Dalam menentukan model terbaik antara *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* maka dibutuhkan kriteria pengujian untuk dapat menentukan model yang paling tepat dalam regresi data panel, yaitu dengan menggunakan uji chow, uji hausman dan uji langrange multiplier.

3.4.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Hipotesis nya adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \text{Common effect model}$$

$$H_a : \text{Fixed effect model}$$

Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 , sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah FEM. Sedangkan, jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H_0 , sehingga model yang tepat adalah CEM. Namun, ketika mendapatkan asumsi model FEM maka harus dilanjutkan ke uji REM untuk mendapatkan hasil uji akhir yang terbaik. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 10% ($\alpha=0,10$).

3.4.2 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Hipotesis nya adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \text{Random effect model}$$

$$H_a : \text{Fixed effect model}$$

Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 , sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah FEM. Sedangkan, jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H_0 , sehingga model yang tepat adalah REM. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 10% ($\alpha=0,10$).

3.4.3 Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk menentukan model terbaik antara *common effect model* dan *random effect model*. Hipotesis nya adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \text{Common effect model}$$

$$H_a : \text{Random effect model}$$

Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 , sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah REM. Sedangkan, jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas yang lebih besar dari

tingkat signifikansi maka menerima H_0 , sehingga model yang tepat adalah CEM. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 10% ($\alpha=0,10$).

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Simultan F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama) dengan tingkat signifikansi sebesar 10%. Jika nilai f hitung lebih besar dari nilai f kritis maka asumsinya keseluruhan variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga menerima H_a . Sedangkan jika nilai f hitung lebih kecil dari nilai f kritis maka asumsinya semua variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen, sehingga menolak H_a . Hipotesis nya adalah sebagai berikut:

Dilihat dari perbandingan nilai f hitung dan nilai f kritis:

- Jika f hitung $>$ f kritis, maka menolak H_0 dan menerima H_a
- Jika f hitung $<$ f kritis, maka menerima H_0 dan menolak H_a

Dilihat dari perbandingan nilai signifikansi:

- Jika signifikansi uji $f > 0,10$ maka menerima H_0 dan menolak H_a
- Jika signifikansi uji $f < 0,10$ maka menolak H_0 dan menerima H_a

3.5.2 Uji Parsial T

Uji T digunakan untuk mengevaluasi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individual) dengan tingkat signifikansi sebesar 10%. Jika nilai p -value lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 , sehingga terdapat pengaruh parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan jika nilai p -value lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H_0 , sehingga tidak terdapat pengaruh parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Hipotesis nya adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1:

H0: $\beta_1 > 0$, secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio gini

Ha: $\beta_1 < 0$, secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap rasio gini.

2. Hipotesis 2:

H0: $\beta_2 > 0$, secara parsial investasi dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio gini

Ha: $\beta_2 < 0$, secara parsial investasi dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap rasio gini

3. Hipotesis 3:

H0: $\beta_3 > 0$, secara parsial indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio gini

Ha: $\beta_3 < 0$, secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap rasio gini

4. Hipotesis 4:

H0: $\beta_4 > 0$, secara parsial belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio gini

Ha: $\beta_4 < 0$, secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan terhadap rasio gini

3.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R-squared) merupakan suatu ukuran yang menjelaskan sejauh mana kontribusi variabel independen dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen (Widarjono, 2018). Nilai R-squared (R^2) berada antara 0 hingga 1, ketika semakin mendekati angka 1 maka semakin baik. Namun, ketika nilai R^2 sebesar 0,6 (60%) maka variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Analisis dari hasil penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2022 akan dijabarkan dalam bab ini. Model yang digunakan dalam jenis penelitian ini berupa data panel yang merupakan gabungan antara jenis data *time series* dan data *cross section*. Pada penelitian ini, data *time series* berupa rentang waktu dari pengambilan data yakni dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Sedangkan data *cross section* berupa data 34 provinsi yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2022. Sumber dan informasi dari data tersebut diperoleh melalui website resmi BPS (Badan Pusat Statistik) dan website resmi DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan variabel bebas berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi Dalam Negeri (PMDN) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Belanja Modal. Sedangkan variabel terikat nya berupa Ketimpangan Pendapatan yang menggunakan ukuran indeks rasio gini (Gini Ratio).

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Pengujian *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), Dan *Random Effect Model* (REM)

Adapun metode regresi yang digunakan dalam data panel ini adalah *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Pengujian terhadap data panel melalui uji regresi dilakukan untuk dapat menentukan model yang terbaik dari beberapa uji yaitu uji chow, uji hausman dan uji LM.

Tabel 4. 1
Hasil Estimasi CEM, FEM dan REM

<i>Variable</i>	<i>Common Effect</i>		<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob	Coefficient	Prob
C	0.134526	0.4306	2.154110	0.0000	2.100991	0.0000
LOG(PDRB)	0.008397	0.0654	-0.066408	0.0002	-0.000378	0.9569
LOG(PMDN)	-0.010384	0.0000	-0.001566	0.1052	-0.002751	0.0038
LOG(IPM)	-0.012444	0.7518	-0.352668	0.0011	-0.458020	0.0000
LOG(CEXP)	0.016527	0.0016	0.032069	0.0001	0.014504	0.0282
<i>R.Squared</i>	0.165848		0.872294		0.275502	
<i>F-Stat</i>	16.65137		55.75166		31.84734	
<i>Prob. F-Stat</i>	0.000000		0.000000		0.000000	
<i>Observations</i>	340		340		340	

Sumber: EViews 12 (data diolah)

Setelah dilakukan pengujian terhadap data melalui model *Common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengujian data tersebut pada uji regresi data panel yakni; uji chow, uji hausman dan uji LM dengan tujuan untuk mendapatkan model terbaik.

4.2.2 Pemilihan Model Terbaik

Dalam melakukan analisis terhadap data berjenis data panel, sangatlah penting untuk melakukan pemilihan metode pendekatan analisis terlebih dahulu. Dalam melakukan pemilihan *best model* dari data panel maka digunakan tiga metode yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier (LM).

4.2.2.1 Uji Chow

Dalam uji ini, data akan diberi perlakuan regresi dengan model *common effect* dan *fixed effect* untuk memilih model terbaik diantara keduanya yang kemudian

membandingkan melalui dua pendekatan *fixed effect* atau *random effect* pada uji hausman. Hipotesis uji chow, sebagai berikut :

$$H_0 = \text{common effect}$$

$$H_a = \text{fixed effect}$$

Tabel 4. 2
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	50.624615	(33,302)	0.0000
Cross-section Chi-square	638.073567	33	0.0000

Sumber: EViews 12 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian diatas, didapatkan nilai probabilitas cross section F sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 10% ($0,000 < 0,10$) artinya menolak H_0 dan menerima H_a . Jadi, dapat disimpulkan bahwa *best model* yang terpilih yaitu model *Fixed Effect*. Sehingga dapat dilanjutkan dengan melakukan uji hausman.

4.2.2.2 Uji Hausman

Uji ini merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan uji chow untuk menemukan model terbaik antara fixed effect atau random effect melalui regresi dengan hipotesis yaitu :

$$H_0 = \text{Random Effect}$$

$$H_a = \text{Fixed Effect}$$

Tabel 4. 3
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	43.487968	4	0.0000

Sumber: EViews 12 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian diatas, didapatkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 10% ($0,000 < 0,10$) artinya menolak H_0 dan menerima H_a . Jadi, dapat disimpulkan bahwa *best model* yang terpilih untuk menganalisis Ketimpangan Pendapatan di Indonesia yaitu menggunakan model fixed effect. Dengan hasil akhir menunjukkan bahwa model fixed effect yang terpilih menjadi model terbaik, maka pendekatan selanjutnya yaitu uji Langrange Multiplier tidak perlu dilakukan.

4.3 Model Terbaik (*Fixed Effect Model*)

Kesimpulan dari analisis regresi data panel, melalui dua tahap uji, yakni Uji Chow dan Uji Hausman, menegaskan bahwa model terbaik adalah model *Fixed Effects*. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa model *fixed effect* memiliki koefisien regresi yang konsisten dari waktu ke waktu, sekaligus menyiratkan hubungan antar variabel maupun antar waktu memiliki kecenderungan tetap atau stabil.

Tabel 4. 4

Model Terbaik Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.154110	0.294198	7.321970	0.0000
LOG(PDRB)	-0.066408	0.017542	-3.785670	0.0002
LOG(PMDN)	-0.001566	0.000964	-1.624836	0.1052
LOG(IPM)	-0.352668	0.107136	-3.291771	0.0011
LOG(CEXP)	0.032069	0.007927	4.045732	0.0001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.014696	R-squared		0.872294
Mean dependent var	0.357426	Adjusted R-squared		0.856648
S.D. dependent var	0.041183	S.E. of regression		0.015593

Akaike info criterion	-5.379019	Sum squared resid	0.073426
Schwarz criterion	-4.951078	Log likelihood	952.4332
Hannan-Quinn criter.	-5.208502	F-statistic	55.75166
Durbin-Watson stat	1.528323	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: EViews 12 (data diolah)

Persamaan regresi

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

$$\begin{aligned} \text{GR} &= 2.15411034649 - 0.06640797595 * \text{LOG(PDRB)} - \\ &0.00156616532768 * \text{LOG(PMDN)} - 0.352667747541 * \text{LOG(IPM)} + \\ &0.0320691511518 * \text{LOG(CEXP)} + e \end{aligned}$$

Keterangan:

Y = Ketimpangan Pendapatan (Indeks Rasio Gini)

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

β_2 = Koefisien Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

β_3 = Koefisien Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

β_4 = Koefisien Belanja Modal

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Simultan (Uji F)

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

(Seluruh variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen)

$$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

(Seluruh variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen)

Berdasarkan hasil pengujian diatas, didapatkan nilai probabilitas F sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 10% ($0,000 < 0,10$) artinya menolak H_0 dan menerima H_a . Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara serentak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

4.4.2 Uji Parsial (Uji T)

1. Variabel X1 (PDRB)

$$H_0: \beta_1 > 0$$

(Secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$$H_a: \beta_1 < 0$$

(Secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Berdasarkan hasil uji diatas, didapatkan nilai probabilitas t sebesar 0.000 dengan tingkat signifikansi 10 % ($0.000 < 0,10$) artinya menolak H_0 dan menerima H_a . Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (rasio gini).

2. Variabel X2 (PMDN)

$$H_0: \beta_2 > 0$$

(Secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$$H_a: \beta_2 < 0$$

(Secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Berdasarkan hasil uji diatas, didapatkan nilai probabilitas t sebesar 01052 dengan tingkat signifikansi 10 % ($0,10 < 0,10$) artinya menerima H_a dan menolak

H0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (rasio gini).

3. Variabel X3 (IPM)

H0: $\beta_3 > 0$

(Secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Ha: $\beta_3 < 0$

(Secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Berdasarkan hasil uji diatas, didapatkan nilai probabilitas t sebesar 0.001 dengan tingkat signifikansi 10 % ($0,001 < 0,10$) artinya menolak H0 dan menerima Ha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen (IPM) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (rasio gini).

4. Variabel X4 (CEXP)

H0: $\beta_4 > 0$

(Secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Ha: $\beta_4 < 0$

(Secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Berdasarkan hasil uji diatas, didapatkan nilai probabilitas t sebesar 0.000 dengan tingkat signifikansi 10 % ($0,000 < 0,10$) artinya menolak H0 dan menerima Ha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen (Belanja Modal) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (rasio gini).

4.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji diatas, didapatkan nilai R-squared sebesar 0.872294 atau 87,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 87,2% variabel Ketimpangan Pendapatan

dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, PMDN, IPM dan Belanja Modal. Sedangkan sisanya sebesar 12,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan

Pendapatan

Berdasarkan dari hasil pengolahan dan pengujian data menggunakan model *fixed effect*, nilai probabilitas variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.0002 dengan nilai koefisien sebesar -0.066408. Dimana nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari alpha 10%, yaitu $0.000 < 0,10$. Sehingga, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan secara individu serta memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Selanjutnya, ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,66408%. Hal ini selaras dengan hipotesis, bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan.

Kuznet dalam bukunya yang berjudul “*economic growth and income inequality*“, menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang sangat kuat. Dimana pertumbuhan ekonomi akan mengarah pada ketimpangan distribusi pendapatan yang akan menyebabkan peningkatan pada ketimpangan pendapatan, namun di tahap selanjutnya akan tercapai pemerataan (Wijayanti & Aisyah, 2022).

Hasil dari penelitian ini didukung dengan teori Kuznet kurva U terbalik. Pada tahap awal, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, di tahap selanjutnya menurunkan ketimpangan pendapatan. Sehingga kedua variabel ini memiliki hubungan yang negatif. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Febriyani & Anis (2021) yang juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berhubungan secara negatif. Rambey (2018), dalam penelitiannya juga menemukan hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

4.6.2 Pengaruh Variabel Investasi Dalam Negeri Terhadap Ketimpangan

Pendapatan

Berdasarkan dari hasil pengolahan dan pengujian data menggunakan model *fixed effect*, nilai probabilitas variabel Investasi Dalam Negeri sebesar 0,1052 dengan nilai koefisien sebesar -0.001566. Dimana nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari alpha 10%, yaitu $0.10 < 0,10$. Sehingga, Investasi Dalam Negeri berpengaruh signifikan secara individu dan memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Selanjutnya, ketika investasi dalam negeri (PMDN) meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan sebesar 0,01566% terhadap gini rasio yang menyebabkan terjadinya penurunan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini selaras dengan hipotesis, bahwa terdapat hubungan negatif antara investasi dalam negeri dengan ketimpangan pendapatan.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Nangarumba (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara investasi dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azim et al. (2022) yang menemukan bahwa PMDN berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Dijelaskan bahwa hubungan negatif antara kedua variabel tersebut mengindikasikan, ketika investasi yang meningkat maka dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Sehingga hubungan keduanya berpengaruh signifikan dan berpengaruh antara satu dengan yang lain.

4.6.3 Pengaruh Variabel Indeks Pembangunan Manusia Terhadap

Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan dari hasil pengolahan dan pengujian data menggunakan model *fixed effect*, nilai probabilitas variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.0011 dengan nilai koefisien sebesar -0.352668. Dimana nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari alpha 10%, yaitu $0.001 < 0,10$. Sehingga, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan secara individu namun memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Selanjutnya, ketika indeks

pembangunan manusia naik sebesar satu satuan maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.352668. Hal ini selaras dengan hipotesis, bahwa terdapat hubungan negatif antara indeks pembangunan manusia dengan ketimpangan pendapatan.

Variabel indeks pembangunan manusia memiliki hubungan kausalitas dua arah dengan variabel ketimpangan pendapatan. Ketika indeks pembangunan manusia mengalami perubahan maka akan menyebabkan efek kausalitas (peningkatan atau penurunan) terhadap ketimpangan pendapatan (Putra et al, 2022). Begitu pun sebaliknya.

Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Suhendra et al. (2020) yang menemukan hasil bahwa indeks pembangunan manusia memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dijelaskan bahwa dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai ukuran sumber daya manusia, maka akan memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

4.6.4 Pengaruh Variabel Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan dari hasil pengolahan dan pengujian data menggunakan model fixed effect, nilai probabilitas variabel Belanja Modal sebesar 0.0001 dengan nilai koefisien sebesar 0.032069. Dimana nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari alpha 10%, yaitu $0.000 < 0,10$. Sehingga, Belanja Modal berpengaruh signifikan secara individu dan memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Selanjutnya, ketika terjadi kenaikan pada belanja modal sebesar satu satuan maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 0,32069. Hal ini selaras dengan hipotesis, bahwa terdapat hubungan positif atau negatif antara belanja modal dengan ketimpangan pendapatan.

Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh Anshari et al. (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif dan

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Danawati et al. (2016) dalam penelitiannya, juga menemukan hasil serupa bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Dijelaskan bahwa, alokasi belanja modal yang terpusat pada provinsi tertentu menyebabkan pembangunan infrastruktur hanya di fokuskan pada daerah berpotensi. Sehingga daerah lain yang tidak potensial cenderung mendapatkan alokasi belanja modal yang lebih rendah dan menyebabkan ketidakmerataan atau ketimpangan. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan kedua variabel dapat berupa positif dan negatif yang sangat bergantung pada bagaimana penggunaan alokasi belanja modal di berbagai daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia Tahun 2013 – 2022. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia, dimana peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja sehingga kesempatan kerja yang tersedia dapat menjangkau lapisan masyarakat dan dapat berorientasi pada sektor-sektor padat karya melalui kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di beberapa provinsi, serta mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Pengaruh signifikan mengindikasikan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sangatlah kuat.
2. Variabel Investasi Dalam Negeri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia, dimana peningkatan pada investasi dalam negeri akan cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan antar provinsi. Hal ini disebabkan investasi yang cenderung terkonsentrasi di provinsi-provinsi dengan infrastruktur dan sumber daya yang lebih baik sehingga manfaat dari investasi hanya dirasakan oleh sebagian wilayah serta kesenjangan dalam berinvestasi di provinsi yang maju dan provinsi yang terbelakang. Pengaruh investasi yang signifikan mengindikasikan bahwa efek penurunan terhadap ketimpangan pendapatan sangatlah kuat.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia, dimana

peningkatan pada indeks pembangunan manusia akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan di setiap provinsi yang mendorong penurunan ketimpangan pendapatan. Selain itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai ukuran modal manusia memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pengaruh IPM yang signifikan mengindikasikan bahwa efek dalam menurunkan ketimpangan pendapatan sangatlah kuat.

4. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia, dimana peningkatan belanja modal akan meningkatkan ketimpangan antar provinsi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja modal dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di suatu provinsi, namun manfaat tersebut tidak terdistribusi secara merata antar provinsi dan hanya daerah berpotensi yang merasakannya. Selain itu, provinsi-provinsi yang sudah lebih maju dan memiliki kemampuan fiskal yang lebih baik cenderung dapat menyerap manfaat belanja modal dengan lebih optimal, sehingga dapat memperbesar kesenjangan pendapatan dengan provinsi-provinsi yang terbelakang. Pengaruh yang signifikan, mengindikasikan bahwa efek dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan sangatlah kuat.

5.2 IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan mengacu pada kesimpulan diatas, penulis mendapatkan beberapa implikasi, sebagai berikut:

1. Kontribusi pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan ketimpangan sangatlah kuat, sehingga pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan PDRB serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang tidak terfokus pada provinsi tertentu namun juga pada fokus pada pemerataan di provinsi yang terbelakang.

2. Kontribusi investasi dalam negeri sudah dapat berorientasi dalam pengurangan ketimpangan pendapatan sebab PMDN berpengaruh signifikan. Dengan pemerataan investasi di beberapa daerah dalam bidang infrastruktur dan sumber daya manusia di provinsi yang terbelakang, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh provinsi di Indonesia.
3. Indeks pembangunan manusia memiliki kontribusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Efek signifikan IPM terhadap penurunan rasio gini sangatlah kuat, sehingga pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Dengan begitu, semakin banyak tingkat pendidikan dan kesehatan yang menjangkau daerah terbelakang maka akan semakin mendorong ketimpangan pendapatan yang menurun.
4. Alokasi belanja modal yang tepat sasaran dan lebih berfokus pada provinsi yang terbelakang sangatlah diperlukan agar pemerataan setiap provinsi dapat dirasakan manfaatnya. Dengan begitu, belanja modal yang awalnya meningkatkan ketimpangan pendapatan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Richard H., Jr.. (2003). *Economic Growth, Inequality, and Poverty : Findings from a New Data Set*. Policy Research Working Paper;No. 2972.
- Amali, F. N., & Syafri (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 815-820.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494-502.
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antarprovinsi di indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1-16.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243-258.
- Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(4), 9-16.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartini, R. (2009). Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Humanity*, 5(1).
- Irawan, F. (2023). *Pengaruh Pmdn, Pma, Tenaga Kerja Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera Tahun 2009-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ishak, J. F., Alamanda, A. R., & Kusumah, R. W. R. (2018). The effect of capital expenditure and investment on income inequality. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 3(01), 51-58.
- Istiqamah, I., Syaparuddin, S., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111-126

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Empat Penyebab Ketimpangan di Indonesia Versi Bank Dunia.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Edisi 4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuznets, S. (2019). *Economic growth and income inequality*. In *The gap between rich and poor* (pp. 25-37). Routledge.
- Maesza, P., Saputro, G. E., & Suwarno, P. (2022). Pengaruh Anggaran Pertahanan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2000-2019. *Jurnal Cafeteria*, 3(1), 130-140.
- Mahardiki, D., & Santoso, R. P. (2013). Analisis perubahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar propinsi di indonesia 2006-2011. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 6(2).
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mansyur, K., Nursini, N., & Hamrullah, H. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 79-107.
- Maorencia, Q. M., & Marwan, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *ARZUSIN*, 3(5), 571-580.
- Nangarumba, M. (2015). Analisis pengaruh struktur ekonomi, Upah minimum provinsi, Belanja modal, dan Investasi terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di indonesia tahun 2005-2014. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (Journal of Economics and Development Studies)*, 7(2), 9-26.
- Priyono & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi*. Dharma Ilmu, 157-161.
- Putra, P. G., Anis, A., & Irfan, M. (2022). Analisis Kausalitas Indeks Pembangunan Manusia Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(4), 57-70.
- Putra, R. F. I., & Lisna, V. (2020). Segitiga Kemiskinan-Pertumbuhan-Ketimpangan (PGI TRIANGLE): Pembangunan Keuangan, Pembangunan Manusia, dan Ketimpangan Pendapatan Di Asia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(2), 77-89.

- Rahma, E. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Jawa. Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, S. E. (2021). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 1158-1168).
- Rambey, M. J. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 32-32.
- Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 12–21.
- Santosa, S. H. (2015). Disparitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi wilayah di Satuan Wilayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur. *Media Trend*, 10(2), 138-155.
- Sudarlan. (2015). Contribution of Human Development Index on Per Capita Income Growth and Poverty Alleviation in Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(8)
- Suhendra, I., Istikomah, N., Ginanjar, R. A. F., & Anwar, C. J. (2020). Human capital, income inequality and economic variables: A panel data estimation from a region in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 571-579.
- Sutawijaya, A. (2010). Pengaruh ekspor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 1980-2006. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 6(1), 14-27.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional ; Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.
- Sjafrizal, Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Todaro. (2007). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Todaro. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Erlangga. Jakarta
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th ed.). Pearson.

- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 103
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Widarjono, A. (2019). *Statistika Terapan Dengan Excel dan SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Wijayanti, E. S., & Aisyah, S. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi asing, inflasi, dan trade openness terhadap ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 534-540.

LAMPIRAN

Lampiran A Data Penelitian

Provinsi	Tahun	PDRB	PMDN	IPM	CEXP	GR
Aceh	2013	111755.83	3636.4	68.30	12640525.64	0.331
	2014	113490.36	5110.3	68.81	13005648.41	0.337
	2015	112665.53	4192.4	69.45	12611106.74	0.339
	2016	116374.30	2456.1	70.00	12653240.53	0.341
	2017	121240.98	782.8	70.60	14813722.42	0.329
	2018	126824.37	970.0	71.19	15335355.06	0.318
	2019	132069.62	3606.9	71.90	18709339.76	0.321
	2020	131580.97	8241.1	71.99	17288017.58	0.319
	2021	135251.19	7904.7	72.18	16752054.21	0.323
	2022	140947.64	4424.2	72.80	16500054.50	0.291
Sumatera Utara	2013	398727.14	5068.9	68.36	7412094.31	0.328
	2014	419573.31	4223.9	68.87	7823455.22	0.31
	2015	440955.85	4287.4	69.51	8495656.86	0.326
	2016	463775.46	4864.2	70.00	10976894.77	0.312
	2017	487531.23	11683.6	70.57	13402544.41	0.335
	2018	512762.63	8371.8	71.18	13544555.11	0.311
	2019	539513.85	19749.0	71.74	14060766.20	0.315
	2020	533746.36	18189.5	71.77	13252957.49	0.314
	2021	547651.82	18484.5	72.00	13956499.45	0.313
	2022	573528.77	22789.2	72.71	13456519.45	0.326
Sumatera Barat	2013	125940.63	677.8	68.91	3424590.63	0.351
	2014	133340.84	421.1	69.36	3876114.72	0.332
	2015	140719.47	1552.5	69.98	4326353.95	0.319
	2016	148134.24	3795.6	70.73	4876171.54	0.312
	2017	155984.36	1517.0	71.24	6363961.13	0.312
	2018	163996.19	2309.4	71.73	6822711.71	0.305
	2019	172205.57	3026.6	72.39	6954111.88	0.307

	2020	169426.61	3106.2	72.38	6701551.41	0.301
	2021	175000.50	4183.7	72.65	6800124.36	0.3
	2022	182629.54	2559.8	73.26	7580124.36	0.292
Riau	2013	436187.51	4874.3	69.91	8972958.92	0.393
	2014	447986.78	7707.6	70.33	9583496.80	0.379
	2015	448991.96	9943.0	70.84	10892856.09	0.366
	2016	458769.34	6613.7	71.20	10075132.95	0.347
	2017	470983.51	10829.8	71.79	9247194.35	0.325
	2018	482064.63	9056.4	72.44	8537822.91	0.347
	2019	495607.05	26292.2	73.00	8771607.07	0.331
	2020	489995.75	34117.8	72.71	8704390.46	0.321
	2021	506471.91	24997.8	72.94	9132748.80	0.327
	2022	529532.98	43062.0	73.52	8725748.46	0.323
Jambi	2013	111766.13	2799.6	67.76	3577072.15	0.327
	2014	119991.44	908.0	68.24	3679159.26	0.342
	2015	125037.40	3540.2	68.89	3604245.24	0.344
	2016	130501.13	3884.4	69.62	3381884.80	0.346
	2017	136501.71	3006.6	69.99	4583486.21	0.334
	2018	142902.00	2876.5	70.65	4869536.54	0.335
	2019	149111.09	4437.4	71.26	5244689.78	0.324
	2020	148354.25	3511.7	71.29	4820947.80	0.316
	2021	153825.49	6204.2	71.63	4534148.84	0.315
	2022	161717.68	8882.7	72.14	4789356.55	0.335
Sumatera Selatan	2013	232175.05	3396.0	66.16	5989474.25	0.375
	2014	243297.77	7042.8	66.75	6247547.26	0.381
	2015	254044.88	10944.1	67.46	6030394.19	0.334
	2016	266857.40	8534.1	68.24	6627641.54	0.362
	2017	281571.01	8200.2	68.86	8260827.60	0.365
	2018	298484.07	9519.8	69.39	9182300.41	0.341
	2019	315464.75	16921.1	70.02	9953600.86	0.339
	2020	315129.22	15824.5	70.01	9753497.94	0.338

	2021	326411.27	16266.9	70.24	10831506.01	0.34
	2022	343483.65	23526.0	70.90	10411786.01	0.33
Bengkulu	2013	34326.37	109.6	67.50	1937725.96	0.372
	2014	36207.15	7.8	68.06	2196415.30	0.355
	2015	38066.01	553.9	68.59	2436203.58	0.371
	2016	40076.54	949.1	69.33	2491650.42	0.354
	2017	42073.52	296.5	69.95	3243391.50	0.349
	2018	44164.11	4902.8	70.64	3202896.45	0.355
	2019	46345.45	5458.1	71.21	3147376.16	0.329
	2020	46338.43	5399.2	71.40	2816000.67	0.323
	2021	47853.78	4923.5	71.64	3067274.14	0.321
	2022	49916.06	6957.3	72.16	3467184.18	0.315
Lampung	2013	180620.01	1325.3	65.73	3925661.23	0.356
	2014	189797.49	3495.7	66.42	4567673.50	0.331
	2015	199536.92	1102.3	66.95	4898783.19	0.352
	2016	209793.73	6031.8	67.65	5691234.11	0.358
	2017	220626.10	7014.8	68.25	7017854.66	0.333
	2018	232165.99	12314.7	69.02	7633025.85	0.326
	2019	244378.31	2428.9	69.57	7481834.73	0.331
	2020	240319.59	7120.5	69.69	7355451.86	0.32
	2021	246966.49	10513.2	69.90	7652495.28	0.314
	2022	257534.19	5809.2	70.45	7478765.23	0.313
Kep. Bangka Belitung	2013	42190.86	608.2	67.92	1814133.51	0.307
	2014	44159.44	615.5	68.27	1921560.50	0.295
	2015	45962.30	1023.7	69.05	2212652.28	0.275
	2016	47848.37	2202.0	69.55	2287560.32	0.288
	2017	49985.15	1734.7	69.99	2468716.68	0.276
	2018	52208.04	3112.9	70.67	2666616.23	0.272
	2019	53941.90	2915.2	71.30	2996476.32	0.262
	2020	52705.94	1863.8	71.47	2624707.17	0.257
	2021	55369.65	3677.4	71.69	3108627.17	0.247

	2022	57803.20	6309.0	72.24	3760532.67	0.255
Kep. Riau	2013	137263.85	417.7	73.02	3358007.16	0.38
	2014	146325.23	28.5	73.40	3457709.85	0.437
	2015	155131.35	612.1	73.75	2649778.42	0.339
	2016	162853.04	492.5	73.99	2852614.78	0.352
	2017	166081.68	1398.0	74.45	3525102.41	0.359
	2018	173498.75	4386.0	74.84	3499838.27	0.339
	2019	181877.67	5656.4	75.48	4046212.15	0.337
	2020	174959.21	14249.0	75.59	3919806.93	0.334
	2021	180952.44	9768.7	75.79	3986942.73	0.339
	2022	190163.70	4817.4	76.46	4276813.15	0.325
DKI Jakarta	2013	1296694.57	5754.5	78.08	48981265.54	0.404
	2014	1373389.13	17811.5	78.39	51418295.34	0.436
	2015	1454563.85	15512.7	78.99	53419020.08	0.421
	2016	1539916.88	12216.9	79.60	59392458.27	0.397
	2017	1635359.15	47262.3	80.06	73535704.73	0.409
	2018	1735208.29	49097.4	80.47	78671227.89	0.39
	2019	1836240.55	62094.8	80.76	74077190.72	0.391
	2020	1792291.09	42954.7	80.77	61469820.82	0.4
	2021	1856075.82	54708.2	81.11	84196593.62	0.411
	2022	1953455.85	89223.6	81.65	84612324.24	0.412
Jawa Barat	2013	1093543.55	9006.1	68.25	22172242.15	0.406
	2014	1149216.06	18726.9	68.80	25897424.86	0.398
	2015	1207232.34	26272.9	69.50	28561852.48	0.426
	2016	1275619.24	30360.2	70.05	31344462.32	0.402
	2017	1343662.14	38390.6	70.69	35512081.60	0.393
	2018	1419624.14	42278.2	71.30	36482714.85	0.405
	2019	1490959.69	49284.2	72.03	39199187.03	0.398
	2020	1453380.72	51400.5	72.09	39376315.68	0.398
	2021	1507746.39	59948.5	72.45	44715065.66	0.406
	2022	1589984.93	80808.3	73.12	45159098.45	0.412

Jawa Tengah	2013	726655.12	12593.6	68.02	14649375.80	0.39
	2014	764959.15	13601.6	68.78	16846898.29	0.388
	2015	806765.09	15410.7	69.49	18517590.79	0.382
	2016	849099.35	24070.4	69.98	20050497.70	0.357
	2017	893750.30	19866.0	70.52	24349750.27	0.365
	2018	941091.14	27474.9	71.12	26231235.04	0.357
	2019	991516.54	18654.7	71.73	27490556.74	0.358
	2020	965227.27	30606.1	71.87	26513084.16	0.359
	2021	997345.05	31311.2	72.16	27383751.30	0.368
	2022	1050322.13	24992.3	72.79	27653891.70	0.366
D.I Yogyakarta	2013	75627.45	283.8	76.44	2986257.42	0.416
	2014	79536.08	703.9	76.81	3529399.06	0.435
	2015	83474.45	362.4	77.59	3911107.93	0.42
	2016	87685.81	948.6	78.38	4270072.67	0.425
	2017	92300.24	294.6	78.89	5279617.12	0.44
	2018	98024.01	6131.7	79.53	5790570.83	0.422
	2019	104485.46	6298.8	79.99	6173815.39	0.428
	2020	101698.52	2683.4	79.97	6035223.91	0.437
	2021	107372.56	2761.3	80.22	6214072.43	0.436
	2022	112898.32	2275.0	80.64	6809027.31	0.459
Jawa Timur	2013	1192789.80	34848.9	67.55	19126277.69	0.368
	2014	1262684.50	38132.0	68.14	22619271.00	0.403
	2015	1331376.10	35489.8	68.95	24678649.61	0.403
	2016	1405563.51	46331.6	69.74	26527236.42	0.402
	2017	1482299.58	45044.5	70.27	31851419.35	0.415
	2018	1563441.82	33333.1	70.77	35289761.23	0.371
	2019	1649895.64	45452.7	71.50	38411057.61	0.364
	2020	1611392.55	55660.6	71.71	36022542.26	0.364
	2021	1668749.44	52552.2	72.14	33044297.50	0.364
	2022	1757821.43	65355.9	72.75	34804427.00	0.365
Banten	2013	331099.11	4008.7	69.47	6681044.02	0.38

	2014	349351.23	8081.3	69.89	8138237.78	0.424
	2015	368377.20	10709.9	70.27	9236214.98	0.386
	2016	387835.09	12426.3	70.96	9786470.31	0.392
	2017	410137.00	15141.9	71.42	10265222.26	0.379
	2018	433782.71	18637.6	71.95	11072775.45	0.367
	2019	456620.03	20708.4	72.44	12281829.27	0.361
	2020	441148.58	31145.7	72.45	12122343.75	0.365
	2021	460963.02	25989.5	72.72	16013254.31	0.363
	2022	484141.83	31283.9	73.32	16589342.71	0.377
Bali	2013	114103.58	2984.7	72.09	5008580.38	0.44
	2014	121787.57	252.8	72.48	5617388.33	0.442
	2015	129126.56	1250.4	73.27	5873708.29	0.399
	2016	137296.45	482.3	73.65	5923695.12	0.374
	2017	144933.31	592.5	74.30	6478848.76	0.379
	2018	154072.66	1548.8	74.77	6701282.42	0.364
	2019	162693.36	7393.2	75.38	7350129.39	0.37
	2020	147498.94	5432.7	75.50	6550977.34	0.369
	2021	143864.97	6355.2	75.69	8582890.26	0.375
	2022	150821.44	6002.1	76.44	9212809.52	0.362
Nusa Tenggara Barat	2013	69766.71	1398.0	63.76	2407728.48	0.349
	2014	73372.96	212.5	64.31	2803255.70	0.391
	2015	89337.99	347.8	65.19	3647333.47	0.36
	2016	94524.29	1342.8	65.81	4148659.60	0.365
	2017	94608.21	5413.5	66.58	5421933.56	0.378
	2018	90349.13	4135.1	67.30	5334651.03	0.391
	2019	93872.44	3519.0	68.14	5293087.74	0.374
	2020	93288.87	6582.4	68.25	5368328.54	0.386
	2021	95437.86	9090.5	68.65	5538931.86	0.384
	2022	102074.07	11031.5	69.46	5982952.83	0.374
Nusa Tenggara	2013	51505.19	17.6	61.68	2639015.36	0.344
	2014	54107.97	3.6	62.26	3022693.42	0.355

Timur	2015	56770.79	1295.7	62.67	3570228.74	0.348
	2016	59678.01	822.2	63.13	4040760.87	0.362
	2017	62725.41	1081.9	63.73	4987988.81	0.359
	2018	65929.19	4246.1	64.39	5059885.08	0.359
	2019	69389.02	3752.6	65.23	5570443.38	0.355
	2020	68809.61	3028.5	65.19	5850641.37	0.356
	2021	70540.66	3742.6	65.28	7994705.98	0.339
	2022	72695.28	3459.3	65.90	6845875.96	0.34
Kalimantan Barat	2013	101980.34	2522.1	64.30	3484572.43	0.384
	2014	107114.96	4320.8	64.89	3847514.85	0.402
	2015	112346.76	6143.5	65.59	4207747.65	0.33
	2016	118183.27	9015.5	65.88	4503517.51	0.331
	2017	124289.17	12380.9	66.26	5562102.84	0.329
	2018	130596.32	6591.4	66.98	5872181.04	0.325
	2019	137243.09	7699.1	67.65	6304659.45	0.318
	2020	134743.38	9256.5	67.66	6242375.51	0.325
	2021	141212.04	10773.4	67.90	7090492.54	0.315
	2022	148368.94	9382.9	68.63	7906842.41	0.311
Kalimantan Tengah	2013	69410.99	1835.3	67.41	3368430.46	0.358
	2014	73724.52	980.4	67.77	3516414.45	0.365
	2015	78890.97	1270.1	68.53	3546928.96	0.3
	2016	83900.24	8179.1	69.13	3587854.40	0.347
	2017	89544.90	3037.8	69.79	4412596.41	0.327
	2018	94566.25	13091.6	70.42	5250299.63	0.344
	2019	100349.29	8591.9	70.91	5680469.60	0.335
	2020	98933.61	3710.0	71.05	5377959.93	0.32
	2021	102481.47	6359.8	71.25	5020296.42	0.32
	2022	109094.72	6556.8	71.63	5780623.35	0.309
Kalimantan Selatan	2013	101850.54	8299.2	67.17	5554735.86	0.356
	2014	106779.40	2616.5	67.63	5656559.72	0.326
	2015	110863.12	2060.4	68.38	5500274.37	0.334

	2016	115743.57	6163.0	69.05	5600689.23	0.351
	2017	121858.52	2981.9	69.65	6002245.38	0.347
	2018	128052.58	9975.2	70.17	6722886.83	0.34
	2019	133283.85	10061.0	70.72	7397117.74	0.334
	2020	130864.32	4286.3	70.91	6879065.04	0.351
	2021	135422.59	11003.9	71.28	5526165.27	0.325
	2022	142339.28	12310.4	71.84	5956615.15	0.309
Kalimantan Timur	2013	438532.91	16034.6	73.21	14830601.03	0.366
	2014	446029.05	12859.0	73.82	12336184.31	0.361
	2015	440676.36	9611.3	74.17	9376312.82	0.315
	2016	439003.83	6885.1	74.59	8212408.94	0.328
	2017	452741.91	10980.2	75.12	8765867.13	0.333
	2018	464694.43	25942.0	75.83	11210807.62	0.342
	2019	486523.18	21952.0	76.61	13637012.67	0.335
	2020	472393.33	25934.0	76.24	12382489.09	0.335
	2021	484438.88	30297.4	76.88	11616186.00	0.331
	2022	506158.91	39595.6	77.44	12326136.00	0.317
Kalimantan Utara	2013	44091.70	22.4	67.99	1732687.13	0.3
	2014	47696.35	642.8	68.64	1826814.28	0.308
	2015	49315.75	921.8	68.76	2628831.64	0.314
	2016	51064.74	3345.7	69.20	3068221.22	0.305
	2017	54537.31	853.3	69.84	2585439.41	0.313
	2018	57459.31	1356.8	70.56	2560729.87	0.304
	2019	61417.79	4400.9	71.15	2797918.13	0.292
	2020	60746.21	2235.2	70.63	2778924.84	0.3
	2021	63162.97	3792.5	71.19	2385056.63	0.285
	2022	66534.39	7526.4	71.83	2135476.96	0.27
Sulawesi Utara	2013	62422.50	66.8	69.49	2314997.12	0.446
	2014	66360.76	83.0	69.96	2570193.13	0.436
	2015	70425.33	270.6	70.39	2818667.73	0.366
	2016	74764.66	5069.6	71.05	2985770.05	0.379

	2017	79484.03	1488.2	71.66	3891526.35	0.394
	2018	84249.72	4320.1	72.20	4080736.28	0.372
	2019	89009.26	8259.6	72.99	4372347.72	0.376
	2020	88126.37	3005.6	72.93	4640155.19	0.368
	2021	91790.93	3480.0	73.30	4167775.94	0.359
	2022	96767.70	5042.1	73.81	4678435.60	0.359
Sulawesi Tengah	2013	68219.32	605.3	65.79	2280723.89	0.391
	2014	71677.53	95.8	66.43	2588136.16	0.352
	2015	82787.20	968.4	66.76	3037417.36	0.37
	2016	91014.56	1081.2	67.47	3253129.59	0.347
	2017	97474.86	1929.7	68.11	3708728.29	0.345
	2018	117555.83	8488.9	68.88	4106731.83	0.317
	2019	127935.06	4438.8	69.50	4567747.53	0.33
	2020	134152.69	5261.3	69.55	4623258.20	0.321
	2021	149848.82	3012.3	69.79	4362164.74	0.326
	2022	172578.03	3758.6	70.28	4632864.47	0.305
Sulawesi Selatan	2013	217589.13	921.0	67.92	5017395.62	0.432
	2014	233988.05	4949.6	68.49	5842842.66	0.448
	2015	250802.99	9215.3	69.15	6415560.02	0.404
	2016	269401.31	3334.6	69.76	7292544.17	0.4
	2017	288814.17	1969.4	70.34	9220494.70	0.429
	2018	309156.19	3275.9	70.90	9444558.01	0.388
	2019	330506.38	5672.6	71.66	9631039.54	0.391
	2020	328154.57	9142.0	71.93	10374681.40	0.382
	2021	343395.41	12075.4	72.24	12548450.52	0.377
	2022	360874.18	7528.0	72.82	12982740.91	0.365
Sulawesi Tenggara	2013	64268.71	1261.6	67.55	2176239.55	0.391
	2014	68291.78	1249.9	68.07	2520563.78	0.399
	2015	72993.33	2015.4	68.75	2886689.89	0.381
	2016	77745.51	1794.2	69.31	3260316.80	0.388
	2017	83001.69	3148.7	69.86	4033244.22	0.404

	2018	88310.05	1603.4	70.61	4138218.33	0.392
	2019	94053.52	3827.1	71.20	4672659.82	0.393
	2020	93445.72	2865.7	71.45	4576358.41	0.388
	2021	97276.36	4334.2	71.66	5260191.61	0.394
	2022	102657.94	7596.0	72.23	5608781.57	0.366
Gorontalo	2013	19367.57	84.4	64.70	1153658.64	0.445
	2014	20775.80	45.1	65.17	1301492.85	0.453
	2015	22068.80	94.3	65.86	1476327.03	0.401
	2016	23507.21	2202.5	66.29	1652703.60	0.41
	2017	25090.13	888.4	67.01	1829856.15	0.405
	2018	26719.27	2666.8	67.71	1889286.42	0.417
	2019	28429.97	844.4	68.49	2002197.71	0.41
	2020	28425.38	683.6	68.68	1948827.40	0.406
	2021	29110.05	1004.3	69.00	1922519.21	0.409
	2022	30286.45	1113.5	69.81	2276479.24	0.423
Sulawesi Barat	2013	22227.39	685.1	61.53	1175239.87	0.324
	2014	24195.65	690.1	62.24	1369496.55	0.378
	2015	25964.43	1103.8	62.96	1473749.82	0.362
	2016	27524.77	84.1	63.60	1814445.27	0.371
	2017	29282.49	660.2	64.30	1977194.94	0.339
	2018	31114.14	3144.2	65.10	1907105.59	0.366
	2019	32843.81	1187.2	65.73	2164143.90	0.365
	2020	32074.02	252.9	66.11	2140482.51	0.356
	2021	32898.23	395.3	66.36	2108767.25	0.366
	2022	33654.78	1313.3	66.92	2528687.51	0.371
Maluku	2013	22100.94	28.6	66.09	1694902.82	0.347
	2014	23567.73	138.7	66.74	1912549.63	0.33
	2015	24859.20	60.8	67.05	2304536.10	0.338
	2016	26284.23	11.4	67.60	2831652.38	0.344
	2017	27814.05	52.3	68.19	2845811.48	0.321
	2018	29457.13	1013.5	68.87	3083520.34	0.326

	2019	31049.45	283.2	69.45	3137388.43	0.32
	2020	30765.89	474.8	69.49	3384151.72	0.326
	2021	31702.75	2939.7	69.71	4021217.74	0.316
	2022	33321.87	611.0	70.22	4401505.48	0.306
Maluku Utara	2013	18208.74	1114.9	64.78	1441124.27	0.32
	2014	19208.76	156.3	65.18	1532719.26	0.322
	2015	20380.30	48.2	65.91	1856130.53	0.286
	2016	21556.68	8.8	66.63	2061128.35	0.309
	2017	23210.86	1150.6	67.20	2312013.10	0.33
	2018	25034.08	2276.3	67.76	2516318.07	0.336
	2019	26597.55	682.7	68.70	2808344.83	0.31
	2020	28031.44	662.1	68.49	2750139.28	0.29
	2021	32739.16	2665.3	68.76	3379037.04	0.278
	2022	40248.39	3414.9	69.47	3892016.02	0.309
Papua Barat	2013	47694.23	304.0	60.91	6010272.07	0.418
	2014	50259.91	100.0	61.28	7096757.00	0.405
	2015	52346.49	63.4	61.73	7506270.57	0.428
	2016	54711.28	10.6	62.21	7257003.26	0.401
	2017	56907.96	59.2	62.99	7838999.86	0.387
	2018	60465.52	50.9	63.74	8098275.58	0.391
	2019	62074.52	380.2	64.70	12420607.33	0.381
	2020	61604.13	1925.4	65.09	11572152.04	0.376
	2021	61289.40	635.6	65.26	7744110.21	0.374
	2022	62518.38	2139.1	65.89	7947610.42	0.384
Papua	2013	117118.82	584.3	56.25	9129555.21	0.441
	2014	121391.23	249.9	56.75	11543021.81	0.459
	2015	130311.60	1275.2	57.25	12986631.90	0.392
	2016	142224.93	220.5	58.05	13071335.66	0.399
	2017	148818.29	1217.9	59.09	14016057.00	0.398
	2018	159711.85	104.6	60.06	14134105.61	0.398
	2019	134565.89	567.7	60.84	17248619.35	0.391

	2020	137787.29	2722.2	60.44	15527559.14	0.395
	2021	158674.30	910.8	60.62	15878964.36	0.396
	2022	172904.85	1311.8	61.39	16420284.43	0.393

Lampiran B Common Effect

Dependent Variable: GR

Method: Panel Least Squares

Date: 05/22/24 Time: 20:41

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.134526	0.170480	0.789097	0.4306
LOG(PDRB)	0.008397	0.004542	1.848635	0.0654
LOG(PMDN)	-0.010384	0.001747	-5.943491	0.0000
LOG(IPM)	-0.012444	0.039316	-0.316525	0.7518
LOG(CEXP)	0.016527	0.005208	3.173406	0.0016
Root MSE	0.037558	R-squared		0.165848
Mean dependent var	0.357426	Adjusted R-squared		0.155888
S.D. dependent var	0.041183	S.E. of regression		0.037837
Akaike info criterion	-3.696449	Sum squared resid		0.479605
Schwarz criterion	-3.640141	Log likelihood		633.3964
Hannan-Quinn criter.	-3.674013	F-statistic		16.65137
Durbin-Watson stat	0.309944	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran C Fixed Effect

Dependent Variable: GR

Method: Panel Least Squares

Date: 05/22/24 Time: 20:44

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.154110	0.294198	7.321970	0.0000
LOG(PDRB)	-0.066408	0.017542	-3.785670	0.0002
LOG(PMDN)	-0.001566	0.000964	-1.624836	0.1052
LOG(IPM)	-0.352668	0.107136	-3.291771	0.0011
LOG(CEXP)	0.032069	0.007927	4.045732	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.014696	R-squared	0.872294
Mean dependent var	0.357426	Adjusted R-squared	0.856648
S.D. dependent var	0.041183	S.E. of regression	0.015593
Akaike info criterion	-5.379019	Sum squared resid	0.073426
Schwarz criterion	-4.951078	Log likelihood	952.4332
Hannan-Quinn criter.	-5.208502	F-statistic	55.75166
Durbin-Watson stat	1.528323	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran D Random Effect

Dependent Variable: GR

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/22/24 Time: 20:46

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.100991	0.210102	9.999863	0.0000
LOG(PDRB)	-0.000378	0.006990	-0.054095	0.9569
LOG(PMDN)	-0.002751	0.000943	-2.918298	0.0038
LOG(IPM)	-0.458020	0.060488	-7.572137	0.0000
LOG(CEXP)	0.014504	0.006578	2.204721	0.0282

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.034571	0.8310
Idiosyncratic random	0.015593	0.1690

Weighted Statistics

Root MSE	0.016364	R-squared	0.275502
Mean dependent var	0.050468	Adjusted R-squared	0.266852
S.D. dependent var	0.019254	S.E. of regression	0.016486
Sum squared resid	0.091050	F-statistic	31.84734
Durbin-Watson stat	1.251494	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	-0.269256	Mean dependent var	0.357426
Sum squared resid	0.729773	Durbin-Watson stat	0.156142

Lampiran E Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	50.624615	(33,302)	0.0000
Cross-section Chi-square	638.073567	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: GR

Method: Panel Least Squares

Date: 05/22/24 Time: 20:45

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.134526	0.170480	0.789097	0.4306
LOG(PDRB)	0.008397	0.004542	1.848635	0.0654
LOG(PMDN)	-0.010384	0.001747	-5.943491	0.0000
LOG(IPM)	-0.012444	0.039316	-0.316525	0.7518
LOG(CEXP)	0.016527	0.005208	3.173406	0.0016
Root MSE	0.037558	R-squared		0.165848
Mean dependent var	0.357426	Adjusted R-squared		0.155888
S.D. dependent var	0.041183	S.E. of regression		0.037837
Akaike info criterion	-3.696449	Sum squared resid		0.479605
Schwarz criterion	-3.640141	Log likelihood		633.3964
Hannan-Quinn criter.	-3.674013	F-statistic		16.65137
Durbin-Watson stat	0.309944	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran F Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	43.487968	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PDRB)	-0.066408	-0.000378	0.000259	0.0000
LOG(PMDN)	-0.001566	-0.002751	0.000000	0.0000
LOG(IPM)	-0.352668	-0.458020	0.007819	0.2335
LOG(CEXP)	0.032069	0.014504	0.000020	0.0001

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: GR

Method: Panel Least Squares

Date: 05/22/24 Time: 20:47

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.154110	0.294198	7.321970	0.0000
LOG(PDRB)	-0.066408	0.017542	-3.785670	0.0002
LOG(PMDN)	-0.001566	0.000964	-1.624836	0.1052
LOG(IPM)	-0.352668	0.107136	-3.291771	0.0011
LOG(CEXP)	0.032069	0.007927	4.045732	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.014696	R-squared	0.872294
Mean dependent var	0.357426	Adjusted R-squared	0.856648

S.D. dependent var	0.041183	S.E. of regression	0.015593
Akaike info criterion	-5.379019	Sum squared resid	0.073426
Schwarz criterion	-4.951078	Log likelihood	952.4332
Hannan-Quinn criter.	-5.208502	F-statistic	55.75166
Durbin-Watson stat	1.528323	Prob(F-statistic)	0.000000
